

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang- undangan

Pancasila

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang- undang Hukum Pidana

Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Undang- undang No.7 Tahun 2021 Tentang Perpajakan

Undang- undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang- Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan

Umum Dan Tata Cara Perpajakan

B. Buku dan Sumber lainnya Alpasha, M. F. (2022). *KAJIAN PUSTAKA* ,

KERANGKA PEMIKIRAN Kajian Pustaka. 19–61.

Amnesty International. (2007). No Title *ЫВМЫВМЫВ. Ятыатат, вы12у(235)*,
245.

*Analisis yuridis penyitaan aset milik terpidana oleh jaksa sebagai pemenuhan
pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana*. (n.d.).

Chazawi, A. (2016). *HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA* (Edisi Revi).

PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Effendy, R. (1989). *AZAS - AZAS HUKUM PIDANA*. Lembaga Percetakan dan
Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.

- Hutahuruk, Y. (2021). Bab 1: Pendahuluan. *Profil Kesehatan Kab.Semarang*, 41(1), 1–9.
- IKAPI, A. (2010). *UNDANG - UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)* (Edisi Asli). FOKUSMEDIA.
- Indonesia, P. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 871.
- INDONESIA, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004*(May), 352.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN* (Edisi Terb). CV ANDI OFFSET.
- Mathematics, A. (2016). 済無 *No Title No Title No Title*. 1–23.
- Media, M. wacana. (2009). *UNDANG- UNDANG PAJAK LENGKAP TAHUN*

2009 (Edisi Asli). Mitra Wacana Media.

N Mulyana, A. (2020). *SANKSI PAJAK Berbasis Penerimaan Negara* (Y. Sri Hayati (Ed.); Edisi Revi). PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Nomor, U., Konservasi, T., Daya, S., Hayati, A., & Pasal, E. (2009). *ibid.* 1. 1–22.

Pidana, A. P. H. (n.d.). *No Title*. 33–242.

Saleh, R. (1981). *PERBUATAN PIDANA dan PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA*. Aksara Baru.

Sofhian, S. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. *Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 65–76.

<https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84>

Surachmin, & Cahyana, S. (2010). *STRATEGI DAN TEKNIK KORUPSI* (Tarmizi (Ed.)). Sinar Grafika.

Sutedi, A. (2011). *Hukum PAJAK* (Tarmizi (Ed.)). Sinar Grafika.

Undang-Undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). (2009). Citra Umbara.

Wahyuni, F. (2017). *DASAR- DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA* (M. Rizki Azmi (Ed.); Edisi ke1). PT Nusantara Persada Utama.

Zainuddin Ali, H. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (L. Wulandari (Ed.)). Sinar Grafika.

C. Sumber lainnya

1) Jurnal

Alpasha, M. F. (2022). *KAJIAN PUSTAKA , KERANGKA PEMIKIRAN Kajian Pustaka*. 19–61.

Amnesty International. (2007). No Title. *Ятыатат, вы12у(235)*, 245.

Analisis yuridis penyitaan aset milik terpidana oleh jaksa sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana. (n.d.).

Chazawi, A. (2016). *HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA* (Edisi Revi). PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Effendy, R. (1989). *AZAS - AZAS HUKUM PIDANA*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.

Hutahuruk, Y. (2021). Bab 1: Pendahuluan. *Profil Kesehatan Kab.Semarang*, 41(1), 1–9.

IKAPI, A. (2010). *UNDANG - UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)* (Edisi Asli). FOKUSMEDIA.

Indonesia, P. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 871.

INDONESIA, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004(May)*, 352.

Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan

Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551.

<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>

Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>

Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN* (Edisi Terb). CV ANDI OFFSET.

Mathematics, A. (2016). 濟無 *No Title No Title No Title*. 1–23.

Media, M. wacana. (2009). *UNDANG- UNDANG PAJAK LENGKAP TAHUN 2009* (Edisi Asli). Mitra Wacana Media.

N Mulyana, A. (2020). *SANKSI PAJAK Berbasis Penerimaan Negara* (Y. Sri Hayati (Ed.); Edisi Revi). PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Nomor, U., Konservasi, T., Daya, S., Hayati, A., & Pasal, E. (2009). *ibid. 1*. 1–22.

Pidana, A. P. H. (n.d.). *No Title*. 33–242.

Saleh, R. (1981). *PERBUATAN PIDANA dan PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA*. Aksara Baru.

Sofhian, S. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. *Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 65–76.

<https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84>

- Surachmin, & Cahyana, S. (2010). *STRATEGI DAN TEKNIK KORUPSI* (Tarmizi (Ed.)). Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum PAJAK* (Tarmizi (Ed.)). Sinar Grafika.
- Undang-Undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)*. (2009). Citra Umbara.
- Wahyuni, F. (2017). *DASAR- DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA* (M. Rizki Azmi (Ed.); Edisi ke1). PT Nusantara Persada Utama.
- Zainuddin Ali, H. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (L. Wulandari (Ed.)). Sinar Grafika.